

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukino (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan

menjadi berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja serta pendidikan menambah keterampilan mereka.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017-2020 tersaji dalam sebuah Gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Indonesia, diolah

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dari 5,03 pada tahun 2016 menjadi 5,07 pada tahun 2017. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,07% kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 5,17%. Namun pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 5,02%. Hal ini disebabkan karena dampak negatif covid-19 yang melumpuhkan perekonomian nasional. Dari sisi pengeluaran hampir seluruh komponen mencatatkan minus sepanjang 2019, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66% terhadap PDB berkontraksi hingga 2,63%. Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) berkontraksi 4,29%, investasi berkontraksi 4,95%, ekspor berkontraksi 7,7%, dan impor berkontraksi 14,71%. Artinya seluruh komponen tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah. Secara keseluruhan, investasi menjadi sumber kontraksi ekonomi terdalam yakni -1,63% hingga konsumsi rumah tangga menyumbang kontraksi sebesar -15,04%.

Pajak merupakan faktor yang amat penting sebagai penerimaan negara yang pokok dalam menopang pembiayaan bagi pembangunan, selain penerimaan non-pajak seperti migas serta non-migas. Sumber APBN kira-kira 75% dipenuhi dari pajak, jadi pajak sebagai penerimaan pemerintah yang paling signifikan untuk memenuhi APBN. Penerimaan pajak yang tinggi bisa memacu negara tertentu meningkatkan pengeluaran belanja-belanja pemerintah, sehingga bisa memacu perekonomian yang berujung bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan penerimaan pajak amat diperlukan terkait dengan bertambahnya keperluan dana belanja rutin dan modal bagi pemerintah. Pajak unyuk pemerintah bukan hanya sumber pendapatan, selain itu juga sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah untuk mengatur roda perekonomian. Tugas dan fungsi pendapatan pajak dilaksanakan oleh institusi Direktorat Jenderal Pajak

yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berikut merupakan gambaran realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2016-2019 tersaji dalam sebuah Gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1.2
Data Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

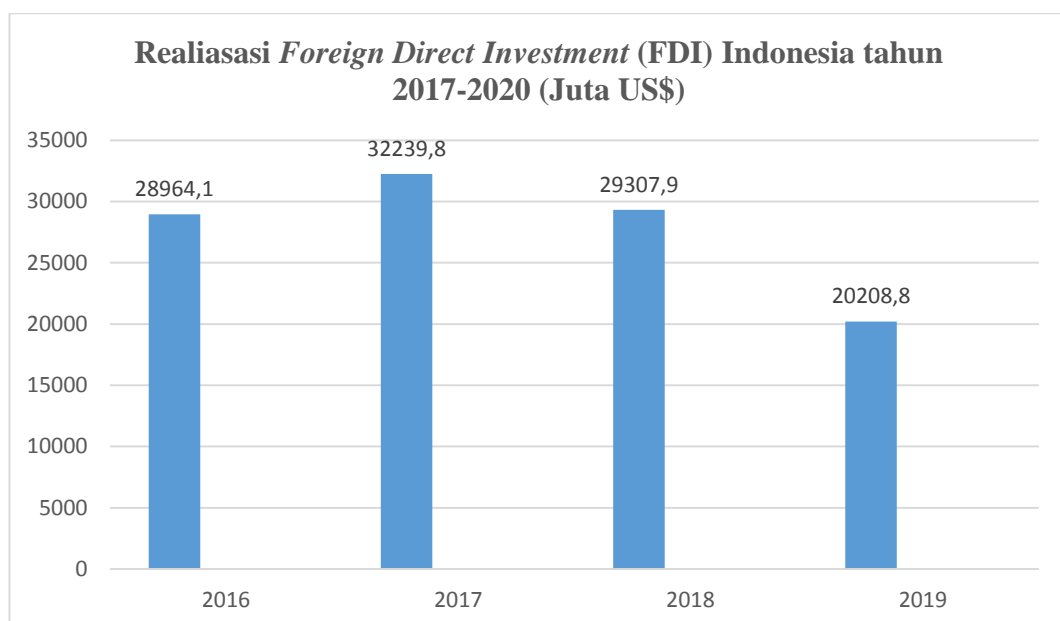
Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2016 penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan dari 1284970,10 miliar rupiah menjadi 1343529,80 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar 1343529,80 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1518789,80 miliar sampai pada tahun 2019 yaitu sebesar 1546141,90 miliar. Hal ini karena kerja keras dari Direktorat Jendral Pajak yang dapat mempertahankan prinsip agar penerimaan pajak selalu mencapai target. Selain itu pemerintah selalu menjaga kesinambungan fiskal diantara dengan melakukan

penyesuaian tarif dan perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Banyak pihak yang mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher, 2018).

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga belum mampu untuk menyediakan seluruh dana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi untuk membiayai pembangunan. Pemerintah dalam hal ini mencari alternatif sumber pembiayaan dalam negeri dalam bentuk penanaman modal salah satunya yaitu *Foreign Direct Investment* (FDI). Berikut merupakan gambaran realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia tahun 2016-2019 tersaji dalam sebuah Gambar 1.3 dibawah ini:



Gambar 1.3

Data Realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia tahun 2016-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2019. *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia mengalami peningkatan dari 28946,1 juta US\$ menjadi sebesar 32239,8 juta US\$. Pada tahun 2017, realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia adalah sebesar 32239,8 juta US\$. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 29307.9 juta US\$, hingga pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 20208,8 juta

US\$. Hal ini disebabkan karena kinerja di beberapa sektor khususnya sektor manufaktur didalam negeri dan kinerja investasinya yang menurun. Selain itu, disebabkan karena dinamika perekonomian global akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi yang tengah dihadapi. Penurunan ini juga sejalan dengan perlambatan FDI secara global yang turun 20%. Selain itu, penurunan ini disebabkan karena rendahnya realisasi investasi asing akibat dampak ekonomi global yang sedang lesu karena investor asing enggan menaruh dananya di Indonesia, harga komoditas yang turun akibat anjloknya harga minyak dunia, dan ruang penurunan suku bunga Bank Indonesia yang tipis menjadi hambatan investasi asing yang masuk.

Ma'ruf dan Wihastuti (2008), teori endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Pemerintah selalu mengusahakan agar aliran modal yang masuk ke Indonesia semakin tinggi, hal ini agar sesuai dengan harapan yaitu semakin besarnya dana yang diperlukan dalam pembangunan, utamanya dalam pembangunan ekonomi.

Untuk melihat penyebab menurunnya laju pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat dari kegiatan ekspor di Indonesia. Alasan negara melakukan ekspor adalah untuk memperluas perdagangan sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Menurut Miranda Goeltom dalam Nancy Nopeline (2015), menyatakan bahwa salah satu upaya yang cukup strategis untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan perdagangan luar negeri. Negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan meningkatkan perdagangan dengan cepat. Berikut merupakan gambaran perkembangan ekspor Indonesia tahun 2016-2019 yang tersaji dalam Gambar 1.4 dibawah ini:



Gambar 1.4
Nilai Ekspor Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: BPS Indonesia, diolah

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa perkembangan nilai ekspor Indonesia mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Ekspor Indonesia mengalami kenaikan dari sebesar 145134,0 juta US\$ pada tahun 2016 menjadi sebesar 168828,2 juta US\$ pada tahun 2017. Pada tahun 2017 perkembangan ekspor Indonesia sebesar 168828,2 juta US\$, kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan berturut-turut menjadi sebesar 180012,7 juta US\$, pada tahun 2019 menjadi sebesar 167683,0 juta US\$. Menurunnya nilai ekspor tahun 2018-2019 beriringan dengan

menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa tinggi rendahnya kegiatan ekspor yang dilakukan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Penurunan nilai ekspor ini disebabkan diantaranya kondisi global yang masih bergejolak, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di negara tujuan ekspor terutama china mengalami penurunan, pemerintah yang lambat melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor, dan penurunan kinerja ekspor komoditas andalan.

Ekspor memegang peranan penting bagi dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Laju pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun ke tahun dari peran ekspor sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut diantaranya adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor bersih (NX). Ekspor akan memberikan dampak positif ke atas kegiatan ekonomi negara, karena merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan

kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2010).

Terkait dengan beberapa fakta permasalahan yang saling berhubungan antara penerimaan pajak, *foreign direct investment* (FDI), dan ekspor secara grafik dan data tahun 2016-2019 yang rata-rata mengalami penurunan di Indonesia. Kondisi tersebut tentu belum diketahui secara detail hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan ataupun penurunan penerimaan pajak, *foreign direct investment* (FDI), ekspor, dan pertumbuhan ekonomi tersebut, lalu bagaimana pengaruhnya. Berdasarkan uraian permasalahan yang teridentifikasi diatas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2007-2019’**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007-2019?
2. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), Ekspor secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2019?

3. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), Ekspor secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), Ekspor secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), Ekspor secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana penambah wawasan dan pemahaman lebih mendalam khususnya tentang Penerimaan Pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2007-2019.

2. Bagi Pemerintah

